



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2025



**Disusun oleh :
Tim**



BPKAL

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen “Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025” telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi seluruh jajaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Prpgram, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025.

Penyusunan Renja ini merupakan implementasi atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja ini juga merujuk pada Keputusan Menteri Dakam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih banyak keada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan data dan informasi dalam penyelesaian dokumen renstra ini.

Akhir kata semoga Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO


Ir. MIEKE JULI ASTUTI

Pembina Utama Muda
NIP. 196407311990022004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 2

 B. Landasan Hukum 3

 C. Mkasud dan Tujuan..... 4

 D. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

 A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 13

 B. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah..... 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 19

 A. Tujuan..... 19

 B. Sasaran..... 23

 C. Strategi..... 33

 C. Arah Kebijakan..... 33

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 19

 A. Uraian Program 19

 B. Uraian Kegiatan 23

 C. Uraian Sub Kegiatan 33

BAB IV PENUTUP 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta melaksanakan kegiatan atas usulan masyarakat.

Rancangan RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indicator kinerja dan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan RKPD yang disusun kedalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternative dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat

Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasarkan Tupoksinya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran Visi dan Misi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien serta akuntabel sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah ;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2021-2026;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
- p. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah dengan menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk Penyusunan Program kegiatan, menentukan Lokasi kegiatan dan menyusun Indikator Kinerja kegiatan serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode Satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ada pun tujuannya sebagaimana renstra yang telah ditetapkan adalah ***Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah*** demi

terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Usulan Program dan Kegiatan beserta pagu pendanaannya. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran apa bila tidak sesuai dengan kebutuhan; serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra SKPD. Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 pada umumnya dapat tercapai hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bernilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan serta indikator kinerja OPD dengan **Tujuan** untuk Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah di Kabupaten Mojokerto dengan **Sasaran** meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan program dan kegiatan sebagaimana kami gambarkan dalam Tabel T-C-29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan) berikut :

TABEL TC-27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2025

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												USER SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
						Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah			OPINI BPK		WTP	683,232,810,835	WTP	731,059,107,593	WTP	782,233,245,125	WTP	871,702,815,688	WTP	895,578,842,344	WTP	3,963,806,821,585	BPKAD
				% OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84,0 (A)	115,633,495,735	84,40 (A)	123,727,840,436	84,80 (A)	132,388,789,267	85,20 (A)	141,706,004,516	85,60 (A)	151,571,924,832	85,60 (A)	665,028,054,786	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan		100%	30,000,000	100%	33,000,000	100%	35,000,000	100%	36,750,000	100%	38,587,500	100%	173,337,500	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5	15,000,000	5	18,000,000	5	19,000,000	5	20,000,000	5	21,500,000	25	93,500,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		12	15,000,000	12	15,000,000	12	16,000,000	12	16,750,000	12	17,087,500	60	79,837,500	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	34,338,973,095	100%	37,000,000,000	100%	40,000,000,000	100%	42,000,000,000	100%	44,100,000,000	100%	197,438,973,095	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		7,403	34,338,973,095	7,403	37,000,000,000	7,403	40,000,000,000	7,403	42,000,000,000	7,403	44,100,000,000	7,403	197,438,973,095	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	467,678,940	100%	515,000,000	100%	606,458,017	100%	636,780,918	100%	670,000,000	100%	2,895,917,875	
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya		2	100,000,000	2	115,000,000	2	134,550,000	2	141,277,500	2	148,341,375	10	639,168,875	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												USER SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
						Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		180	367,678,940	180	400,000,000	180	471,908,017	180	495,503,418	180	521,658,625	180	2,256,749,000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	912,559,500	100%	1,000,000,000	100%	1,050,000,000.00	100%	1,152,500,000.00	100%	1,200,000,000.00	100%	5,315,059,500	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		2	25,000,000	2	35,000,000	2	36,750,000	2	38,587,500	2	41,674,500	10	177,012,000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan		2	200,000,000	2	200,000,000	2	210,000,000	2	220,500,000	2	234,140,000	10	1,064,640,000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12	100,000,000	12	100,000,000	12	105,000,000	12	110,250,000	12	119,070,000	60	534,320,000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2	125,000,000	2	150,000,000	2	157,500,000	2	165,375,000	2	178,605,000	10	776,480,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		48	50,000,000	48	50,000,000	48	52,500,000	48	55,125,000	48	59,535,000	240	267,160,000	
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		2	100,000,000	2	115,000,000	2	120,750,000	2	126,787,500	2	136,930,500	10	599,468,000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		2	75,000,000	2	150,000,000	2	157,500,000	2	165,375,000	2	178,605,000	10	726,480,000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		12	237,559,500	12	200,000,000	12	210,000,000	12	220,500,000	12	251,440,000	60	1,119,499,500	
			Pemantauan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip		100 meter linier	-	-	-	-	-	50,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												USER SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
						Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		100%	200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	100%	1,000,000,000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	1,000,000,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan		100%	79,080,534,200	100%	84,315,715,436	100%	89,800,000,000	100%	96,947,775,786	100%	104,595,337,332	100%	454,739,362,754	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		4	78,850,534,200	4	84,085,715,436	4	89,570,000,000	4	96,717,775,786	4	104,365,337,332	20	453,589,362,754	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		86	230,000,000	84	230,000,000	84	230,000,000	84	230,000,000	84	230,000,000	422	1,150,000,000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		100%	603,750,000	100%	664,125,000	100%	697,331,250	100%	732,197,812	100%	768,000,000	100%	3,465,404,062	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya		35	200,000,000	35	221,425,000	35	232,493,750	35	246,443,375	35	262,957,840	35	1,163,319,965	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi		1	317,500,000	1	356,450,000	1	367,518,750	1	382,596,562	1	396,726,391	1	1,820,791,703	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi		20	86,250,000	20	86,250,000	20	97,318,750	20	103,157,875	20	108,315,769	20	481,292,394	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												USER SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
						Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP		100%	564,199,315,100	100%	603,693,267,157	100%	645,951,795,858	100%	725,831,664,972	100%	739,550,211,078	100%	3,279,226,254,165	
			2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman		100%	1,926,206,575	100%	2,118,827,233	100%	2,224,768,593	100%	2,249,518,594	100%	2,452,807,375	100%	10,972,128,370	
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun		150	150,000,000	150	175,000,000	150	185,000,000	150	185,000,000	150	203,500,000	750	898,500,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun		150	150,000,000	150	175,000,000	150	185,000,000	150	185,000,000	150	203,500,000	750	898,500,000	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi		98	125,000,000	98	150,000,000	98	165,000,000	98	189,750,000	98	181,500,000	490	811,250,000	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi		98	50,000,000	98	75,000,000	98	85,000,000	98	85,000,000	98	93,500,000	490	388,500,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD		450	600,000,000	450	620,000,000	450	640,000,000	450	640,000,000	450	704,000,000	2,250	3,204,000,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		450	652,500,000	450	673,827,233	450	679,768,593	450	679,768,594	450	753,307,375	2,250	3,439,171,795	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan anggaran yang disusun		49	65,000,000	49	75,000,000	49	85,000,000	49	85,000,000	49	93,500,000	245	403,500,000	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		15	133,706,575	15	175,000,000	15	200,000,000	15	200,000,000	15	220,000,000	75	928,706,575	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												USER SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
						Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	1,422,524,700	100%	1,564,777,170	100%	1,643,016,029	100%	1,643,016,029	100%	1,811,425,171	100%	8,084,759,099	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		16	300,000,000	16	350,000,000	16	375,000,000	16	375,000,000	16	412,500,000	80	1,812,500,000	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya		6	200,000,000	6	200,000,000	6	225,000,000	6	225,000,000	6	247,500,000	30	1,097,500,000	
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		8	150,000,000	8	175,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	8	220,000,000	40	945,000,000	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota		300	772,524,700	300	839,777,170	300	843,016,029	300	843,016,029	300	931,425,171	300	4,229,759,099	
			2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	769,218,900	100%	846,140,790	100%	888,447,830	100%	888,447,830	100%	979,513,732	100%	4,371,769,082	
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban		600	100,000,000	600	125,000,000	600	135,000,000	600	135,000,000	600	148,500,000	3,000	643,500,000	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												USER SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
						Target	Rp. (dim ribu)	Target	Rp. (dim ribu)	Target	Rp. (dim ribu)	Target	Rp. (dim ribu)	Target	Rp. (dim ribu)	Target	Rp. (dim ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi		15	40,000,000	15	45,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	55,000,000	75	240,000,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota		225	250,000,000	225	280,000,000	225	290,000,000	225	290,000,000	225	319,000,000	1,125	1,429,000,000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah		7	269,218,900	7	271,140,790	7	278,447,830	7	278,447,830	7	306,292,613	35	1,403,547,963	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota		100	110,000,000	100	125,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	150,721,119	100	655,721,119	
			2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	560,081,364,925	100%	599,163,521,964	100%	641,195,563,406	100%	721,050,682,519	100%	734,306,464,800	100%	3,255,797,597,614	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		2	481,495,825,174		512,435,465,582	2	548,396,543,462	2	609,880,306,000	2	628,060,866,867	10	2,780,269,007,085	
			Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak		1	37,350,847,264		37,431,723,499	1	40,051,944,144	1	42,855,580,234	1	45,855,470,850	5	203,545,565,991	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												USER SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
						Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota		2	41,234,692,487		49,296,332,883	2	52,747,075,800	2	68,314,796,285	2	60,390,127,083	10	271,983,024,538	
		3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD		100%	3,400,000,000	100%	3,638,000,000	100%	3,892,660,000	100%	4,165,146,200	100%	4,456,706,434	100%	19,552,512,634	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD		100%	3,400,000,000	100%	3,638,000,000	100%	3,892,660,000	100%	4,165,146,200	100%	4,456,706,434	100%	19,552,512,634	
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun		3	600,000,000	3	650,000,000	3	677,412,500	3	724,831,375	3	775,569,572	3	3,427,813,447	
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah		-	-	1	125,000,000	1	133,750,000	1	143,112,500	1	153,130,375	1	554,992,875	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2	220,000,000	2	200,000,000	2	218,362,500	2	233,647,875	2	250,003,226	10	1,122,013,601	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah		-	-	5	200,000,000	5	218,362,500	5	233,647,875	5	250,003,226	20	902,013,601	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		576	500,000,000	576	400,000,000	576	428,000,000	576	457,960,000	576	490,017,200	2,880	2,275,977,200	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		500	850,000,000	500	1,200,000,000	500	1,284,000,000	500	1,373,880,000	500	1,470,051,600	2,500	6,177,931,600	
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian barang Milik Daerah		4	200,000,000	4	200,000,000	4	223,362,500	4	238,997,875	4	255,727,726	20	1,118,088,101	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												USER SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
						Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		192	830,000,000	192	325,000,000	192	347,750,000	192	372,092,500	192	398,138,975	960	2,272,981,475	
			Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah		-	-	576	125,000,000	576	133,750,000	576	143,112,500	576	153,130,375	2,304	554,992,875	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota		96	200,000,000	96	213,000,000	96	227,910,000	96	243,863,700	96	260,934,159	96	1,145,707,859	

TABEL 2.2

(T.C-30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
PENCAPAIAN KINERJA BPKAD
TAHUN 2023

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian				Proyeksi Capaian		Analisis Capaian
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	IT = Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Tujuan dapat tercapai, dikarenakan Program dan Kegiatan yang diusulkan dapat berjalan sesuai harapan, dimana outcome dari Program dan Ouput dari Kegiatan targetnya terpenuhi
2.	IS = Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran ini dapat tercapai, dapat dilihat dari temuan BPK dari tahun ketahun berkurang dari segi tata kelola keuangan dan aset



Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut :

Penjelasan Penjabaran Tabel diatas :

Bahwa pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD atas pencapaian Visi Misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD atas Opini BPK dapat diraih sesuai harapan yakni WTP.

Demikian juga atas Inkikator Kinerja Utama yang ke 2 yakni Persentase SKPD dengan tata kelola keuangan yang baik dapat dicapai secara maksimal yani seluruh SKPD telah menerapkan pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan baik.

Kedua hal tersebut diatas sejalan dengan capaian indicator kinerja program dan kegiatan yang diampuh oleh Para Kepala Bidang di BPKAD Kab. Mojokerto dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Target Indikator Kinerja Program pada Bidang Anggaran adalah Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman.

Pada tahun 2023 lalu BPKAD menargetkan 100 % atas penyusunan RKA di OPD sesuai pedoman. Pencapai target ini didasarkan pada Siklus Penyusunan APBD dan PAPBD dalam Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilandasi pedoman dari Menteri Dalam Negeri. Dari target capaian yang ditetapkan tersebut dapat dikatakan **tercapai** karena Penyusunan APBD 2023 didukung Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA dan Prioritas Plafon Anggaran sesuai RKPD Pemerintah Daerah.

Pencapaian atas taget Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) Kegiatan dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan,yaitu :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

7. Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mencapai Indikator Kinerja “Prosentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman” dapat dikategorikan **sangat berhasil dengan capaian kinerja 100%**, hal ini dapat digambarkan bahwa ukuran keberhasilan dari pencapaian hasil Indikator tersebut bahwa Rancangan APD telah disajikan sesuai program dan Kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan, dimana RKA yang disusun Perangkat Daerah telah mengacu pada RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

2. **Target Indikator Kinerja Program ke 2 yaitu Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan**

Pada tahun 2023 pemerintah Daerah telah melakukan program dan kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan bagaimana bisa meningkat seluruh Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP. Dari pelaksanaan Program dan kegiatan dengan indikator Program dapat dikatakan sangat berhasil. Keberhasilan ini dapat dicapai karena penetapan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan betul-betul tepat sasaran, baik dari pembinaan, pengendalian, koordinasi maupun rekonsiliasi serta Asistensi penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh OPD tidak mengalami hambatan apapun.

Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan, 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Koordinasi, Fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
3. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan
4. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi asset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Target Indikator Kinerja Program yang ke 3 adalah Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan

Dengan diberlakukannya Permendagri 19 Tahun 2017, maka Pemerintah Daerah menargetkan seluruh Perangkat Daerah dapat melaksanakan pengelolaan BMD tersebut sesuai amanat dalam Permendagri, dari Pendataan Aset, Penilaian Aset, Penghapusan Aset serta Pemindahtangan Aset. Agar Indikator tersebut dapat tercapai Bidang Pengelolaan Aset telah menetapkan Program dan beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu :

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD
2. Penatausahaan BMD
3. Pengamanan BMD
4. Penilaian Barang Milik Daerah
5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah
6. Pembinaan Pengelolaan barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Bidang Pengelolaan Aset tersebut, seluruh OPD telah dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta rekonsiliasi secara berkesinambungan setiap bulan sehingga Target Indikator yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29 tersebut diatas.

Dengan demikian, Dari hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatas, dimana telah diuraikan masing-masing sesuai Target Indikator dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atas tercapainya Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berhasil dari tahun ke tahun. Hal ini karena didukung atas keberhasilan atas Penetapan Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang sampai dengan level Staf.

KESIMPULAN :

Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa penyerapan anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah sebesar 93,00 % atau sebesar Rp. 600.529.720.651,- dari total pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 639.752.607.741,-

Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman SDM dalam proses penyusunan penganggaran
2. Adanya efesiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan
3. Adanya regulasi proses pengadaan barang dan jasa

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja
2. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para stakeholder

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sedangkan Permasalahan kurangnya dari segi pencapaian kinerja untuk mewujudkan tujuan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset tidak mencapai target yang diinginkan secara optimal, dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang berdisiplin Ekonomi Akuntansi ;
2. Rendahnya Kualitas Pengelola Keuangan di SKPD ;
3. Kurang Berperannya Kepala SKPD se Kab. Mojokerto selaku Pengguna Anggaran yang peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah ;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan di Bidang penatausahaan keuangan daerah ;

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan, pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan kepada para pengelola keuangan SKPD se Kab. Mojokerto ;
2. Melakukan evaluasi Kinerja dalam rangka penyempurnaan peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah ;
3. Identifikasi fakto-faktor apa yang diharapkan mampu memberikan dukungan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi ;
4. Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang lingkup Internal BPKAD dan SKPD se Kab. Mojokerto melalui Koordinasi, Komunikasi dan konsolidasi.

Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan peningkatan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto, maka perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM utamanya di Bidang Pengelolaan Keuangan dan asset melalui kursus, pelatihan, asistensi dan pembinaan ;
2. Memperbaiki system pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas system pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan SKPD ;
3. Meningkatkan kualitas reviu atas Laporan Kinerja SKPD ;

4. Melakukan Validasi dan rekonsiliasi data asset dengan SKPD se Kab. Mojokerto

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada BPKAD

Berdasarkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta teramanatkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Kinerja pelayanan tahun 2023 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan dengan dukungan SKPD lain. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2021-2026 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam pelaporan keuangan, karena selaku BPKAD menyajikan 2 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan selaku SKPD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Demikian juga dalam Penyusunan RKA/DPA, Belanjanya berbeda dengan SKPD lain, karena terdapat belanja tidak terduga dan belanja transfer yang tidak terdapat di SKPD lain.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. tahun 2023

Kabupaten Mojokerto mempunyai SILPA lumayan besar, dikarenakan SKP tidak merealisasikan secara optimal.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang dieembannya, yang dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan pengelolaan keuangan dan aset dari masing-masing SKPD
3. Terbatasnya SDM pengelola Keuangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai Disiplin Ilmu yang diinginkan.
4. Kurang peran aktifnya Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan penunjang kerja yang dimiliki.

Sedangkan dari sisi kualitas, sebagaimana Sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil Opini atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengeluaran (WTP) berturut-turut sebanyak 7 (tujuh) kali, hal ini dikarenakan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana tergambar dalam Tabel T.C-30 berikut :

TABEL T.C-30
PENCAPAIAN KINERJA BPKAD

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Analisis Capaian
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
1.	IT = Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Tujuan dapat tercapai, dikarenakan Program dan Kegiatan yang diusulkan dapat berjalan sesuai harapan, dimana outcome dari Program dan Ouput dari Kegiatan targetnya terpenuhi
2.	IS = Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran ini dapat tercapai, dapat dilihat dari temuan BPK dari tahun ketahun berkurang dari segi tata kelola keuangan dan aset

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari:

1. Gambaran Umum Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal
 - Sarana dan Prasarana kerja perlu ditingkatkan.
 - Terbatasnya dana penunjang kegiatan.
 - Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan
 - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan:
 - Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah
 - Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan
 - Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
 - Belum optimalnya pendataan aset milik daerah
3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto :

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021– 2026 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

 1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat;
 2. Meningkatnya sumber daya manusia PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 3. Meningkatnya kualitas PNS selaku pelayan masyarakat;
 4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah sekaligus membangun terwujudnya aspirasi, partisipasi dan transparansi serta keterlibatan peran serta masyarakat;
 5. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
 6. Terciptanya infrastruktur perekonomian dalam peningkatan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi;
 7. Tumbuh dan berkembangnya usaha agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta keterlibatan UMKM secara aktif;

8. Terjalinnya hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
9. Terjalinnya hubungan yang harmonis serta koordinasi yang efektif mulai dari Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat pemerintahan terendah (pemerintah desa)
10. Terserapnya informasi, kreativitas dan inovasi masyarakat dan turut serta pada pembangunan daerah;
11. Meningkatnya prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan prasarana lainnya yang dapat mendukung terbentuknya SDM yang berkualitas;
12. Terciptanya keselarasan antara imtaq dan iptek yang harus dimiliki oleh semua masyarakat (pelajar);
13. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten;
14. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
15. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga terwujud suatu kondisi daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan;
16. Meningkatnya pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat baik pelayanan yang bersifat perijinan maupun non perijinan;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto. Disamping itu juga, dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Mojokerto. Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Dalam rancangan awal RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 dimana dapat dilihat bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena adanya beberapa program dan kegiatan baru yang sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Juga besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2,3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
REVIU TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	RKPD PERUBAHAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Pagu Indikatif
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	KEUANGAN				692,764,979,397					692,764,979,397
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.80	129,651,045,847	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.80	129,651,045,847
			Nilai Reformasi Birokrasi	75.00				Nilai Reformasi Birokrasi	75.00	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	
			Indeks Profesionalitas ASN	83				Indeks Profesionalitas ASN	83	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	100%	15,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	100%	15,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	7,500,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	7,500,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	12 laporan	7,500,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	12 laporan	7,500,000.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	35,212,425,975	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	35,212,425,975
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	35,212,425,975.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	35,212,425,975.00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	684,884,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	684,884,000
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	2 paket	100,000,000.00	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	2 paket	100,000,000.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	180 Orang	584,884,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	180 Orang	584,884,000.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	1,013,802,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	1,013,802,000
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	15,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	15,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	244,762,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	244,762,000.00
	Penyediaan bahan logistik kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	130,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	130,000,000.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	125,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	125,000,000.00

	Penyediaan bahan bacaan dan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan bacaan dan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	30,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan bacaan dan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	30,000,000.00
	Penyediaan bahan/material	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	115,000,000.00	Penyediaan Bahan / Material	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	115,000,000.00
	Fasilitasi Kunjungan tamu	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12 laporan	120,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12 laporan	120,000,000.00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	234,040,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	234,040,000.00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	92,169,683,872	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	92,169,683,872
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	92,020,183,872.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	92,020,183,872.00
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 laporan	149,500,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 laporan	149,500,000.00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	555,250,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	555,250,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	200,000,000.00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	200,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	269,000,000.00	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	269,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 unit	86,250,000.00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 unit	86,250,000.00
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	95%	558,604,605,550	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	95%	558,604,605,550
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	95%	1,478,710,000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	95%	1,478,710,000
	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 Dokumen	156,970,000.00	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 Dokumen	156,970,000.00
	Koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	150 Dokumen	150,000,000.00	Koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	150 Dokumen	150,000,000.00
	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	301,000,000.00	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	301,000,000.00
	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA - SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	65,770,000.00	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA - SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	65,770,000.00
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450 Dokumen	332,711,000.00	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450 Dokumen	332,711,000.00

	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450 Dokumen	312,259,000.00	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450 Dokumen	312,259,000.00
	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	49 Dokumen	35,000,000.00	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	49 Dokumen	35,000,000.00
	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	15 Dokumen	125,000,000.00	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	15 Dokumen	125,000,000.00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1,190,405,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1,190,405,000
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	576 Dokumen	350,385,000.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	576 Dokumen	350,385,000.00
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Dokumen	200,250,000.00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Dokumen	200,250,000.00
	Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	8 Dokumen	118,970,000.00	Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	8 Dokumen	118,970,000.00
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	520,800,000.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	520,800,000.00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	100%	434,500,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	100%	434,500,000
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	600 Dokumen	100,000,000.00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	600 Dokumen	100,000,000.00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	15 Laporan	39,500,000.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	15 Laporan	39,500,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	225 Dokumen	145,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	225 Dokumen	145,000,000.00

	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7 Dokumen	50,000,000.00	Koordinasi, Singkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7 Dokumen	50,000,000.00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100,000,000.00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100,000,000.00
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	555,500,990,550	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	555,500,990,550
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	491,985,528,318	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	491,985,528,318
	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	25,563,066,554	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	25,563,066,554
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	12 Laporan	37,952,395,678	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	12 Laporan	37,952,395,678
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	4,509,328,000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	4,509,328,000
			Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi				Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	4,509,328,000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	4,509,328,000
	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Harga yang disusun	3 Dokumen	1,008,821,000.00	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Harga yang disusun	3 Dokumen	1,008,821,000.00
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	69,400,000.00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	69,400,000.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	187,879,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	187,879,000.00
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	189,100,000.00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	189,100,000.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	589,324,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	589,324,000.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	1,590,720,000.00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	1,590,720,000.00
	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	241,035,000.00	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	241,035,000.00

	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	392,369,000.00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	392,369,000.00
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	576 Laporan	60,360,000.00	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	576 Laporan	60,360,000.00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	180,320,000.00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	180,320,000.00

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto dan dibutuhkan untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan asset/barang daerah adalah Nihil, karena sampai dengan saat Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan baik dari Masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi serta dari Perangkat Daerah yang ditujukan langsung kepada kami tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.

Pada Tahun 2025, dimana merupakan tahun pertama pelaksanaan program pembangunan Visi Misi Bupati terpilih dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional dan pelaksanaan program Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2025 adalah (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antarwilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja. Perekonomian nasional tahun 2025 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Untuk mengakselerasi perekonomian tahun 2025, Pemerintah akan merealisasikan belanja negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai prioritas dengan didukung oleh penerimaan negara yang optimal serta sumber pembiayaan yang terukur dan terkendali. Pemerintah akan terus meningkatkan penggunaan APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar terwujud keadilan sosial yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dicapai melalui peningkatan investasi yang akan terus didorong melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi, dengan penggunaan APBN sebagai katalis sekaligus pendorong pembangunan. Dengan demikian, tema kebijakan fiskal tahun 2025 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Misi ke 3 Rencana jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan”. Sedangkan untuk mencapai misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 menentukan tujuan dan arah dalam melaksanakan Pembangunan sesuai dengan Tupoksinya yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik . Tujuan tersebut harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan Indikator Tujuan adalah Opini BPK.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Indikator Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 3 (tiga) program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang direncanakan BPKAD Kabupaten Mojokerto sebagai Pelaksanaan pencapaian misi ke 3 RPJMD pada tahun 2025, terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program ini mengusulkan Pagu pada Tahun 2025 sebesar Rp. 141.656.004.51652,-
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan dalam mengelola Laporan Keuangan Daerah. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2025 sebesar Rp. 691.168.421.568,-
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aplikasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BMD sesuai ketentuan. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2025 sebesar Rp. 4.165.146.200,-

Dalam Menjalankan Program tersebut harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat top-down didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Untuk BPKAD Indikator

sasaran RPJMD adalah Opini BPK terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan target (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun 2023, maka BPKAD mengusulkan beberapa kegiatan sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.33 berikut:

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			RENCANA KERJA TAHUN 2025					TARGE T CAPAI AN KINER JA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OPINI BPK		WTP	871,702,815,688			WTP	895,578,842,344
		% OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik		100%				100%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85,20 (A)	141,706,004,516	APBD		85,60 (A)	151,571,924,832
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	SEKRETARIAT BPKAD	100%	36,750,000	APBD		100%	38,587,500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	SEKRETARIAT BPKAD	5	20,000,000	APBD		5	21,500,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	SEKRETARIAT BPKAD	12	16,750,000	APBD		12	17,087,500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	100%	42,000,000,000	APBD		100%	44,100,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	SEKRETARIAT BPKAD	7,403	42,000,000,000	APBD		7,403	44,100,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	100%	636,780,918	APBD		100%	670,000,000
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	SEKRETARIAT BPKAD	2	141,277,500	APBD		2	148,341,375
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	SEKRETARIAT BPKAD	180	495,503,418	APBD		180	521,658,625
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	100%	1,152,500,000.00	APBD		100%	1,200,000,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	2	38,587,500	APBD		2	41,674,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	2	220,500,000	APBD		2	234,140,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	12	110,250,000	APBD		12	119,070,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	2	165,375,000	APBD		2	178,605,000
	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	48	55,125,000	APBD		48	59,535,000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	2	126,787,500	APBD		2	136,930,500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	SEKRETARIAT BPKAD	2	165,375,000	APBD		2	178,605,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	SEKRETARIAT BPKAD	12	220,500,000	APBD		12	251,440,000

Kode	URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			RENCANA KERJA TAHUN 2025					TARGE T CAPAI AN KINER JA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemantauanahan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip	SEKRETARIAT BPKAD		50,000,000	APBD			100,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD		200,000,000	APBD			200,000,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	1	200,000,000	APBD		1	200,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	100%	96,947,775,786	APBD		100%	104,595,337,332
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SEKRETARIAT BPKAD	4	96,717,775,786	APBD		4	104,365,337,332
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	SEKRETARIAT BPKAD	84	230,000,000	APBD		84	230,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	SEKRETARIAT BPKAD	100%	732,197,812	APBD		100%	768,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	SEKRETARIAT BPKAD	35	246,443,375	APBD		35	262,957,840
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabil itasi	SEKRETARIAT BPKAD	1	382,596,562	APBD		1	396,726,391
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabil itasi	SEKRETARIAT BPKAD	20	103,157,875	APBD		20	108,315,769
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP		100%	725,831,664,972	APBD		100%	739,550,211,078
	2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	Bidang Anggaran	100%	2,249,518,594	APBD		100%	2,452,807,375
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Bidang Anggaran	150	185,000,000	APBD		150	203,500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Bidang Anggaran	150	185,000,000	APBD		150	203,500,000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Bidang Anggaran	98	189,750,000	APBD		98	181,500,000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Bidang Anggaran	98	85,000,000	APBD		98	93,500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD	Bidang Anggaran	450	640,000,000	APBD		450	704,000,000

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			RENCANA KERJA TAHUN 2025					TARGE T CAPAI AN KINER JA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bidang Anggaran	450	679,768,594	APBD		450	753,307,375
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan anggaran yang disusun	Bidang Anggaran	49	85,000,000	APBD		49	93,500,000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bidang Anggaran	15	200,000,000	APBD		15	220,000,000
	2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	100%	1,643,016,029	APBD		100%	1,811,425,171
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	16	375,000,000	APBD		16	412,500,000
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	6	225,000,000	APBD		6	247,500,000
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	8	200,000,000	APBD		8	220,000,000
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	300	843,016,029	APBD		300	931,425,171
	2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	100%	888,447,830	APBD		100%	979,513,732
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	600	135,000,000	APBD		600	148,500,000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	15	50,000,000	APBD		15	55,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	225	290,000,000	APBD		225	319,000,000

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			RENCANA KERJA TAHUN 2025					TARGE T CAPAI AN KINER JA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	7	278,447,830	APBD		7	306,292,613
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten / Kota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	100	135,000,000	APBD		100	150,721,119
	2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	SEKRETARIAT BPKAD	100%	721,050,682,519	APBD		100%	734,306,464,800
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	SEKRETARIAT BPKAD	2	609,880,306,000	APBD		2	628,060,866,867
	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	SEKRETARIAT BPKAD	1	42,855,580,234	APBD		1	45,855,470,850
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT BPKAD	2	68,314,796,285	APBD		2	60,390,127,083
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	Bidang Pengelolaan BMD	100%	4,165,146,200	APBD		100%	4,456,706,434
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	Bidang Pengelolaan BMD	100%	4,165,146,200	APBD		100%	4,456,706,434
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	Bidang Pengelolaan BMD	3	724,831,375	APBD		3	775,569,572
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Bidang Pengelolaan BMD	1	143,112,500	APBD		1	153,130,375
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	2	233,647,875	APBD		2	250,003,226
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Bidang Pengelolaan BMD	5	233,647,875	APBD		5	250,003,226
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	576	457,960,000	APBD		576	490,017,200
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	500	1,373,880,000	APBD		500	1,470,051,600
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	4	238,997,875	APBD		4	255,727,726
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	192	372,092,500	APBD		192	398,138,975
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	576	143,112,500	APBD		576	153,130,375

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			RENCANA KERJA TAHUN 2025					TARGE T CAPAI AN KINER JA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Bidang Pengelolaan BMD	96	243,863,700	APBD		96	260,934,159

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada rancangan Awal RKPD Pemerintah Daerah yang memuat Program dan kegiatan dengan pagu pendanaan yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan Program perlu dukungan kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh BPKAD Kabupaten Mojokerto yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas Indikator sasaran RPJMD yakni Opini BPK terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah dengan target (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun 2023 tersebut, maka BPKAD mengusulkan beberapa Program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dengan kegiatan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diusulkan sebesar Rp. 7.500.000,-

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diusulkan sebesar Rp. 15.000.000,-

1.2 Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan asn diusulkan sebesar Rp. 37.000.000.000,-

1.3 Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.3.1 *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya,* diusulkan sebesar 115.000.000,-

1.3.2 *Sosialisasi peraturan perundang-undangan* diusulkan sebesar 400.000.000,-

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.4.1 *Pengadaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor diusulkan sebesar Rp. 35.000.000,-*
- 1.4.2 *Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-*
- 1.4.3 *Penyediaan bahan logistik kantor diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-*
- 1.4.4 *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan diusulkan sebesar Rp. 150.000.000,-*
- 1.4.5 *Penyediaan bahan bacaan dan per UU diusulkan sebesar Rp. 50.000.000,-*
- 1.4.6 *Penyediaan bahan/material diusulkan sebesar Rp. 115.000.000,-*
- 1.4.7 *Fasilitasi Kunjungan tamu diusulkan sebesar Rp. 150.000.000,-*
- 1.4.8 *Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-*

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.5.1 *Penyediaan jasa komunikasi, Sda dan listrik diusulkan sebesar Rp. 82.799.542.669,-*
- 1.5.2 *Penyediaan jasa pelayanan umum kantor diusulkan sebesar Rp. 230.000.000,-*

1.6 Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.6.1 *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional dan jabatan diusulkan sebesar Rp. 321.425.000,-*
- 1.6.2 *Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp. 250.450.000,-*
- 1.6.3 *Pemeliharaan/rehab sarana dan pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp. 86.250.000,-*

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dengan kegiatan sebagai berikut :

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah

2.1.1 Koordinasi penyusunan KUA dan PPA diusulkan sebesar Rp. 160.000.000

2.1.2 Koordinasi penyusunan KUPA dan perubahan PPAS diusulkan sebesar Rp. 150.000.000

2.1.3 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD diusulkan sebesar Rp. 275.000.000

2.1.4 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD diusulkan sebesar Rp. 100.000.000

2.1.5 Koordinasi dan penyusunan Perda ABD dan Perkada tentang Penjabaran APBD diusulkan sebesar Rp. 375.000.000

2.1.6 Koordinasi dan penyusunan Perda PAPBD dan Perkada tentang Penjabaran PAPBD diusulkan sebesar Rp. 375.000.000

2.1.7 Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran diusulkan sebesar Rp. 50.000.000

2.1.8 Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan diusulkan sebesar Rp. 50.000.000

2.2 Koordinasi pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2.2.1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah diusulkan sebesar Rp. 350.000.000

2.2.2 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya diusulkan sebesar Rp. 200.000.000

2.2.3 Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan diusulkan sebesar Rp. 175.000.000

2.2.4 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerinth Daerah diusulkan sebesar Rp. 839.777.170

- 2.3 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan Daerah
 - 2.3.1 Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban diusulkan sebesar Rp. 280.000.000
 - 2.3.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diusulkan sebesar Rp. 75.000.000
 - 2.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 331.140.790
 - 2.3.4 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 160.000.000
- 2.4 Penunjang urusan kewenangan pengelolaan Daerah
 - 2.4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan diusulkan sebesar Rp. 512.435.465.582,-
 - 2.4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak diusulkan sebesar Rp. 37.431.723.499
 - 2.4.3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 49.296.332.883

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

adalah keseluruhan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Program ini meliputi kegiatan :

- 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.1 Penyusunan Standar Harga Rp. 650.000.000,00
 - 3.1.2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD diusulkan sebesar Rp. 300.000.000,-
 - 3.1.3 Penatausahaan BMD diusulkan sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 3.1.4 Pengamanan BMD diusulkan sebesar Rp. 875.000.000,-

- 3.1.5 Penilaian Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 375.000.000,-
- 3.1.6 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 500.000.000,-
- 3.1.7 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 438.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025 yang akan datang.

Pengelolaan Keuangan yang Baik mengandung maksud mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam batasan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan Visi – Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Target capaian yaitu Opini BPK = WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mojokerto, Juni 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640731 199003 2 005